

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Niko. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dos Santos, Abel. 2014. *Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Dalam Mendorong Good Governance Di Republik Demokratik Timor Leste (Studi Kasus Di Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah Dan Kementerian Solidaritas Sosial Republik Demokratik Timor Leste)*. Tesis. Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Eko.Sutoro. 2007. *Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa*. Makalah Masa Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Depertemen Dalam Negeri. FPPD dan DRSP-USAID. Jakarta.
- Eni Surasih, Maria. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Faridah Dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya, dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.5 (2015).
- Fradiyanto, Ari. 2015. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*, Skripsi: Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama:Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin dalam Burhan Bungin (ed). 2001. *Metode Penelitian Kualitatif;Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Juliantara, Dadang (Ed). 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Juniaster Tampubolon, Richardo. 2014. *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*, Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Maritim Raja Haji, Tanjung Pinang.

Kupasbengkulu.com, 6 November 2015, *Warga Kecewa Dana Desa Tidak Transparan*, dalam (online), <http://kupasbengkulu.com/warga-kecewa-dana-Desa-tidak-transparan/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2016, Pukul 21.45 WIB.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas, dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Airlangga.

Malo, Manasse.1985. *Metode Penelitian Sosial Modul 1-5*. Kuranika; Jakarta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press.

----- . 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Press.

Pariamantodays.com. Mei 2015, *Gunakan Dana Desa Efektif dan Efisien, Desa Air Santok Wakili Kota Pariaman Tingkat Sumbar*, (online) dalam ([http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-Desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb\\_NHY.twitter](http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-Desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb_NHY.twitter)), di akses pada tanggal 2 Juni 2016, Pukul 20.24 WIB.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembangian Dan Penetapan Besaran Dana Desa, Tata Cara Penyaluran, Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

- Rona Putra, Dian. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Balai Adat Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Padang.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah, menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samaware.com, 8 April 2016, BPK: Pengelolaan Keuangan Desa Masih Bermasalah, dalam (online) <http://www.samaware.com/2016/04/bpk-pengelolaan-keuangan-Desa-masih-bermasalah/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, Pukul 02.19 WIB.
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Prima*, Bandung: Mutiara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Teguh Sulistiani, Ambar. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perpspektif Sumber Daya Manusia: Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja.HAW. 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, R.B. Bely Dj, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Keuangan Desa*, Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).